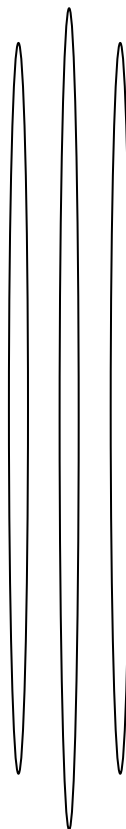




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS KOPERASI ,USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025 – 2029**



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
JL. Pahlawan No. 52 Telepon (0525) 21451 BUNTOK Kode Pos 73711

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,

Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu capaian Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan adalah tercapainya kesejahteraan di segala bidang bagi Masyarakat Barito Selatan, hal ini sangat relevan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2023-2026 yaitu “ *TERWUJUDNYA BARITO SELATAN YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING SERTA MENJADI PENYANGGA PANGAN DAN ENERGI IBU KOTA NUSANTARA*“, Visi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh oleh semua PD sebagai kebijakan implementatif, termasuk di dalamnya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan merupakan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dinas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan. Penyusunan Renstra ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Didalam dokumen Renstra ini merumuskan Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan, dan langkah-langkah capaian kegiatan, disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2029 dalam membangun Kabupaten Barito Selatan lima tahun kedepan.

Kami menyadari Dokumen Renstra ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka.

Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan di Bidang Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan Kabupaten Barito Selatan.

Buntok ,

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BARITO SELATAN



HARMITO, S.Pd., MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700201 199303 1 019

...i...

TIM PENYUSUN RENSTRA 2025 – 2029

Pengarah/
Penanggungjawab : Kepala Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah
Perindustrian dan Perdagangan Kab.Barito Selatan

Ketua : Sekretaris

Sekretaris : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Anggota : JFU Pengadministrasian Umum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	
1.3. Maksud dan Tujuan	
1.4. Sistematika Penulisan	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1.4 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah	
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan Renstra.....	
3.2. Sasaran Renstra.....	
3.3. Strategis	
3.4. Arah Kebijakan	
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, Sub KEGIATAN serta PENDANAAN	
4.1. Rincian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan	
4.2. Rincian Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan	
4.3. Uraian Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan...	
4.4. Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas.....	
4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran resntra tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	
4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja kunci (IKK)	
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN	

RENSTRA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Selatan berpedoman pada ketentuan Pasal 59 permendagri nomor : 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD,RPJMD dan RKPD, Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029.

Demikian pula Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan. (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas.

Selain itu Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP).

Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program Prioritas, Kegiatan serta Tolok Ukur Kinerja pencapaiannya diterjemahkan secara sistematis dan terpadu dalam paparan berikut :

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8

- Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Intruksi menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17,);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029
31. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 23);
32. Perda No.20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dan tujuan dibuat / disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) adalah merupakan dokumen perencanaan dan sebagai acuan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) satuan kerja perangkat daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan pada 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

- a. Tersedianya bahan evaluasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan
- b. Memudahkan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.
- c. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 Berpedoman pada Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, Sub KEGIATAN serta PENDANAAN

BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan

2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi satuan kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2024, tanggal 12 Agustus 2024.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan untuk melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024, tanggal 12 AGUSTUS 2024 .tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;.
4. Bidang Industri;
5. Bidang Perdagangan;
6. UPTD Pasar Beringin Buntok;
7. UPTD Kemetrolagian Legal;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sekretariat membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Bidang Industri membawahi Jabatan Fungsional :
 - Pengawas Industri
 - Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Industri
 - Pramuka Kebersihan
3. Bidang Perdagangan membawahi Jabatan Fungsional :
 - Pengelola Pasar
 - Pengelola Fasilitas dan Mediasi Perlindungan Konsumen
 - Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
 - Pramuka Kebersihan
4. Bidang Koperasi dan UKM, membawahi Jabatan Fungsional:
 - Pengadministrasi Izin Usaha
 - Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha
 - Pengelola Permodalan Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah
 - Pramuka Kebersihan
5. UPTD Pasar Beringin Buntok terdiri dari :
 - Kepala UPTD
 - Sub. Bagian Tata Usaha
6. UPTD Kemetrollogian Legal
 - Kepala UPTD
 - Sub. Bagian Tata Usaha
7. Kelompok Jabatan Fungsional

[illegible]

2.1.2 Sumber Daya

Tabel 1 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan adalah :

No	Pegawai	Jumlah	Ket
1	PNS	29 Orang	
2	CPNS	6 Orang	
3	PPPK/Honoror pada Dinas KUKMPP	67 Orang	
Jumlah		102 Orang	

Tabel 2 .Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan adalah berdasarkan Jabatan Struktural :

No	Eselon	Jumlah	Ket
1	Eselon II	1 Orang	
2	Eselon III	4 Orang	
3	Eselon IV	4 Orang	
Jumlah		9 Orang	

Tabel 3 .Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan bedasarkan Pendidikan :

No	Pegawai	Jumlah	Ket
1	Sarjana (S2)	5 Orang	
2	Sarjana (S1)	23 Orang	
3	Sarjana Muda (D3)	3 Orang	
4	SLTA	4 Orang	
5	SLTP	0 Orang	
	SD	0 Orang	
Jumlah		35 Orang	

Tabel 4 .Struktur Organisasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Jumlah Pegawai Negeri Sipil :

No	Struktur	Jumlah	Ket
1	Kepala Dinas	1 Orang	
2	Sekretaris	1 Orang	
3	Sekretariat	6 Orang	
4	Bidang Industri	6 Orang	
5	Bidang Perdagangan	5 Orang	
6	Bidang Koperasi dan UKM	3 Orang	
7	UPTD	13 Orang	
Jumlah		35 Orang	

2.1 .3 Kinerja Pelayanan

Penyusunan Renstra didasarkan pada arah kebijakan yang ditetapkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta dengan mempedomani Renstra Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, atas dasar itu maka Penetapan Indikator Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan Pelaksana tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan mengacu pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan serta Indikator Kinerja Renstra Kementerian yang Relevan sehingga setiap Pencapaian target Kinerja oleh Dinas Perdagangan , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat memberikan Kontribusi dalam Pencapaian RPJMD .

Berikut disampaikan Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Daerah RPJMD dan Perangkat Daerah (PD) terdiri dari :

1. INDIKATOR TUJUAN DAERAH RPJMD

- 1. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem usaha lokal dan pemanfaatan potensi wilayah
- 2. Memperkuat pondasi dan kinerja ekonomi daerah yang adaptif-produktif berbasis potensi lokal secara berkelanjutan
- 3. Meningkatnya Kepercayaan, Efisiensi, dan Kemudahan terhadap Pelayanan Publik

2. INDIKATOR SASARAN DAERAH RPJMD

- 1. Meningkatnya Kontribusi dan Kinerja Usaha Lokal dalam Perekonomian Daerah
- 2. Terwujudnya Struktur dan Kinerja Ekonomi Daerah yang Kuat dan Berdaya Saing

3. INDIKATOR TUJUAN RENSTRA PD

1. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel
2. Mewujudkan Kualitas Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam
3. Mewujudkan Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
4. Mewujudkan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
5. Mewujudkan Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan
6. Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas
7. Mewujudkan Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal
8. Mewujudkan Pertumbuhan Wirausaha
9. Mewujudkan Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor
10. Mewujudkan Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan
11. Mewujudkan Sarana Perdagangan yang berkualitas
12. Mewujudkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
13. Mewujudkan Nilai Ekspor Barang
14. Mewujudkan Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi
15. Mewujudkan pelaksanaan metrologi legal dalam rangka perlindungan konsumen
16. Mewujudkan Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri
17. Meningkatkan Izin Usaha Industri yang Diterbitkan
18. Meningkatkan Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini

2. SASARAN RENSTRA

1. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel
2. Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam
3. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi
4. Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi
5. Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian
6. Meningkatnya produktivitas koperasi
7. Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
8. Meningkatnya daya saing UMKM
9. Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha
10. Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi
11. Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
12. Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor
13. Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk
14. Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
15. Meningkatnya realisasi pembangunan industri
16. Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor Perindustrian
17. Meningkatnya pemanfaatan informasi industri

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan di atas, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Barito Selatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang Perdagangan, Koperasi UKM, serta Perindustrian Kabupaten Barito Selatan. Faktor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya. Berikut ini adalah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Barito Selatan selama lima tahun kedepan.

2.1.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan segala aspek yang dapat menghambat kinerja pelayanan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Terbukanya akses pasar produk berbagai negara dengan adanya perdagangan bebas;
- b. Semakin pesatnya perkembangan pusat-pusat perdagangan di Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan;
- c. Meningkatnya produk yang masuk ke Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan kualitas teknologi yang lebih baik dibandingkan produk lokal;
- d. Tersedianya banyak produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif; dan Tingginya tingkat persaingan usaha.

Tantangan pengembangan Koperasi dan UMKM ke depan antara lain yaitu menjadikan Koperasi dan UMKM sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi dan peran yang signifikan dalam peningkatan perekonomian daerah. Hal ini membutuhkan dukungan kebijakan dan keberpihakan terhadap pengembangan Koperasi dan UMKM. Keberpihakan bagi koperasi dan UMKM bertujuan untuk memberikan motivasi dan meningkatkan semangat berkoperasi di kalangan masyarakat. Disamping itu koperasi juga harus bisa mandiri, mengingat koperasi memiliki prinsip partisipasi, kebersamaan dan kemandirian. Untuk itu perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, gerakan koperasi, Dekopinwil dan pemangku kepentingan lainnya. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bidang Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan juga diidentifikasi dari faktor eksternal seperti sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM.

Tantangan dan peluang pelayanan Bidang Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan untuk lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola kelembagaan organisasi Koperasi dan UKM
 - Jumlah Koperasi dan UMKM yang cukup besar menjadi tantangan bagi Bidang Koperasi dan UKM untuk mengoptimalkan potensi ekonomi anggota Koperasi dan pelaku UMKM.

- Tingkat kepercayaan masyarakat pada koperasi dan UKM semakin tinggi dan kecepatan pelayanan perijinan koperasi dan UKM
2. Peningkatan usaha Koperasi dan UMKM
Pertumbuhan volume usaha Koperasi dan UMKM menjadi tantangan bagi Bidang Koperasi dan UKM, karena masih rendahnya kinerja usaha koperasi sektor riil.
 3. Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM
 - Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM menjadi tantangan bagi Bidang Koperasi dan UKM baik dari segi kelembagaan maupun produk yang dihasilkan koperasi dan UMKM.
 - Kreatifitas dan inovasi bentuk usaha masyarakat semakin beragam dan perlu adanya bimbingan teknis menjadi wirausaha baru.
 4. Peningkatan skala usaha Koperasi dan UMKM
 - Pertumbuhan Koperasi dan UMKM menjadi tantangan bagi Bidang Koperasi dan UKM karena sulitnya tumbuh usaha mikro menjadi skala usaha yang lebih besar.
 - Usaha koperasi dan UKM menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.4.2 Peluang

Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari potensi/kemampuan. Peluang yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19;
 - b. Tersedianya potensi usaha;
 - c. Semakin meningkatnya masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan;
 - d. Pangsa pasar yang semakin terbuka; dan
 - e. Terbukanya lapangan kerja.
1. Peningkatan tata kelola kelembagaan organisasi Koperasi dan UMKM Nilai-nilai dan prinsip koperasi dapat menjadikan koperasi maju dan mampu membantu anggotanya melalui upaya kolektif yang produktif, efektif, efisien dan berkelanjutan.
 2. Peningkatan usaha Koperasi dan UMKM
 - Kebersamaan dalam pengelolaan Koperasi akan mengurangi resiko persaingan antara anggota, meningkatkan posisi tawar terhadap pihak eksternal dan menghasilkan manfaat yang adil.
 - Semakin terbukanya bentuk/jenis usaha di masyarakat sehingga memerlukan pendampingan pendampingan usaha yang berkesinambungan
 3. Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM
Dengan adanya pasar bebas atau globalisasi perekonomian dunia akan menjadi peluang bagi pelaku koperasi dan UMKM yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya saing.
 4. Peningkatan skala usaha Koperasi dan UMKM
Globalisasi dan era digital merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh UMKM dalam mengembangkan usaha melalui digitalisasi

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

2.2.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan :

1. Terbatasnya jumlah SDM baik tenaga struktural maupun fungsional.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
3. Pembinaan pengusaha/perajin IKM masih belum maksimal dan belum menyentuh secara keseluruhan ke jenis/cabang industri binaan karena terbatasnya dana yang tersedia dan SDM pada bidang IKM yang masih kurang/terbatas.

Secara umum permasalahan strategis yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya tingkat profesionalisme SDM Aparatur dan SDM Perdagangan, Koperasi dan UKM;
2. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional;
3. Kurangnya Permodalan Koperasi dan UKM;
4. Masih banyaknya Koperasi yang tidak aktif dan harus sudah dibubarkan sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
5. Inovasi produk Belum Optimal ;
6. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing Perdagangan, Koperasi dan UKM;
7. Sarana dan prasarana perdagangan yang belum optimal;
8. Pengambilan kebijakan Pembinaan kepada para pelaku usaha sulit dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data, dan laporan mengenai perkembangan usahanya, yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah;
9. Belum adanya pusat promosi yang khusus menginformasikan secara luas produk unggulan daerah dari Perdagangan, Koperasi dan UKM;
10. Rendahnya daya saing produk UKM dalam menghadapi dampak globalisasi;

2.2.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam tahun-tahun mendatang Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan akan melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Mengoptimalkan kualitas dan profesionalisme aparat dalam pelayanan dunia usaha
2. Berkembangnya sektor Industri dan Perdagangan yang kuat dan mandiri
3. Menciptakan rasa aman bagi masyarakat pengguna barang dan jasa dengan tepat sasaran
4. Mengoptimalkan pelayanan publik seperti Pelayanan WATAKAM dalam rangka memfasilitasi pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM)
5. Mengoptimalkan pelayanan publik dalam rangka memfasilitasi pertumbuhan Koperasi khususnya Koperasi Merah Putih
6. Mengoptimalkan pelatihan teknis/ diklat dalam rangka peningkatan keterampilan teknis Pengurus, Pengawas dan pengelola Koperasi UMKM secara khusus Koperasi Merah Putih
7. Mendorong penghimpunan modal sendiri/ intern dan memfasilitasi peningkatan akses terhadap sumber-sumber permodalan dari luar/ ekstern, dalam rangka peningkatan permodalan Koperasi dan UMKM dengan pola Kemitraan.
8. Mengoptimalkan promosi produk Koperasi dan UMKM serta peluang investasi setiap kesempatan, dalam rangka perluasan jaringan pemasaran produk Koperasi UMKM serta mengundang minat investor untuk menanam modal/ investasi sesuai dengan potensi daerah.
9. Memberikan kesempatan kepada aparatur Pembina/ Pejabat untuk mengikuti pendidikan formal/ diklat teknis, sesuai kebutuhan/tupoksi dalam rangka peningkatan SDM Aparatur dalam pengembangan Koperasi, UMKM.
10. Melaksanakan pengadaan sarana fisik sesuai kebutuhan dan standar kerja.
11. Mengadakan koordinasi dengan dinas terkait untuk melaksanakan kebijakan dalam meningkatkan lingkup ekonomi masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan pijakan utama dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terstruktur dan terukur. Berdasarkan hirarki level kinerja, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 terdapat pada level strategic objectives yang bersifat makro, jangka menengah, dan lintas urusan, serta menjadi kerangka acuan bagi perumusan tujuan spesifik urusan (tactical objectives) dan tujuan operasional (operational objectives) di tingkat perangkat daerah. Tujuan pembangunan daerah merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah, serta menggambarkan arah capaian kinerja pembangunan yang menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah secara menyeluruh. Sementara itu, sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan kondisi terukur sebagai hasil dari penyelenggaraan pembangunan daerah. Sasaran dirumuskan secara lebih spesifik, realistis, terukur, dan dapat dicapai. Sesuai prinsip SMART-C (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bound, dan Continuously Improve), setiap sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, sehingga memudahkan proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Selain mengacu pada visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 juga memperhatikan permasalahan dan isu lingkungan dinamis. Dengan demikian, perumusan tujuan dan sasaran yang tepat dan kontekstual akan memastikan arah pembangunan daerah lebih terstruktur dan berorientasi pada hasil yang nyata. Adapun tujuan pembangunan RPJMD dan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 3 RPJMD : Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem usaha lokal dan pemanfaatan potensi wilayah

Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 2 “Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-3 yaitu antara lain: Meningkatnya kontribusi dan kinerja usaha lokal dalam perekonomian daerah.

Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan untuk Mendukung Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD dimaksud yaitu di bagi ada 2 Urusan antara lain :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah dengan Indikator Outcome yaitu Meningkatkan Kontribusi UMKM terhadap PDRB

Tujuan Renstra :

1. Mewujudkan Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
2. Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Meningkatkan Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan
4. Meningkatkan Koperasi yang Berkualitas
5. Meningkatkan Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal
6. Meningkatkan Pertumbuhan Wirausaha
7. Meningkatkan Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor

Sasaran Renstra :

1. Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam
2. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi
3. Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi
4. Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian
- 5.
6. Meningkatnya Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal
7. Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha
8. Meningkatnya Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor

2. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dengan Indikator Outcome yaitu Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Tujuan Renstra :

1. Meningkatkan Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan

Sasaran Renstra :

1. Meningkatnya Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan

Tujuan 5 RPJMD : Memperkuat fondasi dan kinerja ekonomi daerah yang adaptif-produktif berbasis potensi lokal secara berkelanjutan

Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 2 “Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-5 yaitu Terwujudnya struktur dan kinerja ekonomi daerah yang kuat dan berdaya saing.

Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan untuk Mendukung Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD dimaksud yaitu di bagi ada 2 Urusan antara lain :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dengan Indikator Outcome yaitu Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Tujuan Renstra :

1. Meningkatkan Sarana Perdagangan yang berkualitas
2. Meningkatkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
3. Meningkatkan Nilai Ekspor Barang

Sasaran Renstra :

1. Meningkatnya Sarana Perdagangan yang berkualitas
2. Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
3. Meningkatnya Nilai Ekspor Barang

2. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dengan Indikator Outcome yaitu Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Tujuan Renstra :

1. Meningkatkan Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri

Sasaran Renstra :

1. Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri

Tujuan 9 RPJMD : **Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik**

Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 5 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik”. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-9 yaitu Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan untuk Mendukung Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD dimaksud yaitu di bagi ada 3 Urusan antara lain :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah dengan Indikator Outcome yaitu Meningkatkan Kontribusi UMKM terhadap PDRB

Tujuan Renstra :

1. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel
2. Meningkatkan Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam

Sasaran Renstra :

1. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel
2. Meningkatnya Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam

2. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dengan Indikator Outcome yaitu Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Tujuan Renstra :

1. Meningkatkan Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi

2. Meningkatkan pelaksanaan metrologi legal dalam rangka perlindungan konsumen

Sasaran Renstra :

1. Meningkatnya Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi
2. Meningkatnya pelaksanaan metrologi legal dalam rangka perlindungan konsumen

3. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dengan Indikator Outcome yaitu Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Tujuan Renstra :

1. Meningkatkan Izin Usaha Industri yang Diterbitkan
2. Meningkatkan Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini

Sasaran Renstra :

1. Meningkatnya Izin Usaha Industri yang Diterbitkan
2. Meningkatnya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini

3.3 Strategi

Sasaran pembangunan ditujukan untuk memberikan gambaran rangkaian kinerja yang mungkin tercapai hingga tahun 2029, sebagai pertimbangan untuk menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan. Pertimbangan yang digunakan yaitu berdasarkan karakteristik dan kemampuan daerah, isu strategis, sasaran visi dan sasaran pokok RPJPD 2025-2045, serta RPJMN Tahun 2025-2029. Pertimbangan yang digunakan yaitu berdasarkan karakteristik dan kemampuan daerah, isu strategis, sasaran visi dan sasaran pokok RPJPD 2025-2045, serta RPJMN Tahun 2025–2029. Penjelasan terkait sasaran pembangunan di Kabupaten Barito Selatan dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1.1. Tema Pembangunan

Pada tahun 2026, tahap Persiapan Pondasi SDM dan Infrastruktur Dasar mengusung tema peningkatan kualitas SDM, infrastruktur dasar, dan penguatan nilai budaya. Hal ini sejalan dengan misi pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 (tahun rencana 2026 – 2030), yaitu:

- Misi 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil,
- Misi 3: Pembangunan infrastruktur wilayah untuk percepatan ekonomi dan sosial budaya,
- Misi 4: Penguatan kondisi sosial budaya daerah berbasis kearifan lokal.

Langkah ini bertujuan untuk membangun fondasi pendidikan, layanan kesehatan, dan budaya lokal sebagai pijakan awal. Memasuki tahun 2027, tahap Pondasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan mengangkat tema ketahanan pangan dan energi yang sejalan dengan misi:

- Misi 2: Pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya dengan kelestarian lingkungan,
- Misi 6: Ketahanan pangan dan energi berkelanjutan.

311 Fokusnya adalah mendorong hilirisasi berbasis komoditas lokal guna menciptakan kemandirian ekonomi dan energi. Pada tahun 2028, tahap Percepatan Peletakan Pondasi Transformasi dengan tema akselerasi infrastruktur dan tata kelola responsif selaras dengan:

- Misi 3, mempercepat infrastruktur ekonomi dan budaya, serta
- Misi 5, mewujudkan tata kelola pemerintahan profesional dan pelayanan publik.

Tahap tersebut menandai pergeseran fokus pada kualitas layanan publik dan fondasi struktural pemerintahan. Selanjutnya, tahun 2029 menjadi tahap Pemantapan Pondasi Transformasi dengan tema penguatan pembangunan pentahelix inklusif. Semua misi 1–6 diberdayakan secara simultan, baik meliputi SDM, ekonomi, infrastruktur, budaya, tata kelola, pangan maupun energi. Hal tersebut menunjukkan puncak konsolidasi pondasi menuju daerah yang lebih adaptif dan tangguh. Kemudian, pada tahun 2030, tahap Perwujudan Pondasi Transformasi diterjemahkan sebagai tema pembangunan infrastruktur berkualitas, pelestarian budaya lokal, dan layanan publik profesional. Misi 1 – 6 kembali bersinergi yang menunjukkan bahwa seluruh program telah mengakar dan siap didorong menuju fase implementasi lanjutan di periode berikutnya.

Secara keseluruhan, rencana tahunan ini memperlihatkan kesinambungan dan sistematika mulai dari memperkuat fondasi yang meliputi peningkatan kapasitas SDM dan budaya, mengembangkan ekonomi berkelanjutan, mempercepat tata kelola dan infrastruktur, melakukan konsolidasi seluruh sektor, serta mewujudkan hasil akumulatif dari keseluruhan tahapan pembangunan yang telah dilakukan. Setiap tema tahunan terintegrasi dengan misi strategis RPJMD untuk memastikan pembangunan berjalan berurutan, fokus, dan hasilnya dapat terukur.

3.4 Arah Kebijakan.

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur;
- b. Meningkatkan kinerja Koperasi dan UKM agar memiliki daya saing dan produktivitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pelakunya;
- c. Meningkatkan peran IKM dalam perekonomian masyarakat;
- d. Meningkatkan promosi produk daerah ;
- e. Melindungi hak – hak konsumen ;
- f. Meningkatkan pengelolaan pasar.

PROGRAM, KEGIATAN, Sub KEGIATAN serta PENDANAAN

Rincian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan dapat di ilustrasikan di Tabel 4.1 dibawah ini :

[illegible]

Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan dapat di ilustrasikan di Tabel 4.2 dibawah ini :

**TABEL 4.3 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

[illegible]

NOPE DUE SAKSIAN RPUNDI YAKO BETESIAN	TULUN	SALAHAN	OUTCOME	OUTPUT	REMARKS	PROGRESS / KELOMPOK / WAKTU	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah dokumen hasil Kunjungan dan Kunjungan Pengamatan terhadap Pelayanan Bakti Kecamatan dengan sistem informasi Kecamatan (Monev) yang terdapat di Kecamatan (Monev) melakukan kunjungan Kecamatan (Monev) dan akan lebih cukup (Monev) yang mampu meningkatkan pelayanan publik (Monev)	2.31.02.2018 Kecamatan dan Kecamatan Pengamatan terhadap Pelayanan Bakti Kecamatan (Monev) yang terdapat di Kecamatan (Monev) melakukan kunjungan Kecamatan (Monev)	
					Jumlah dokumen Laporan kegiatan pengamatan pengamatan terhadap Kecamatan (Monev) yang terdapat di Kecamatan (Monev) melakukan kunjungan Kecamatan (Monev) dan akan lebih cukup (Monev) yang mampu meningkatkan pelayanan publik (Monev)	2.31.02.2018 Kecamatan dan Kecamatan Pengamatan terhadap Pelayanan Bakti Kecamatan (Monev) yang terdapat di Kecamatan (Monev) melakukan kunjungan Kecamatan (Monev) dan akan lebih cukup (Monev) yang mampu meningkatkan pelayanan publik (Monev)	
			Monev pengamatan terhadap Kecamatan		Terdapatnya dokumen Kecamatan dan Kecamatan (Monev)	2.31.02.2018 Kecamatan dan Kecamatan (Monev)	
				Terdapatnya dokumen Kecamatan dan Kecamatan (Monev)	Jumlah dokumen hasil Kunjungan dan Kunjungan Pengamatan terhadap Pelayanan Bakti Kecamatan dengan sistem informasi Kecamatan (Monev) yang terdapat di Kecamatan (Monev) melakukan kunjungan Kecamatan (Monev) dan akan lebih cukup (Monev) yang mampu meningkatkan pelayanan publik (Monev)	2.31.02.2018 Kecamatan dan Kecamatan Pengamatan terhadap Pelayanan Bakti Kecamatan (Monev) yang terdapat di Kecamatan (Monev) melakukan kunjungan Kecamatan (Monev)	
				Jumlah dokumen hasil Kunjungan dan Kunjungan Pengamatan terhadap Pelayanan Bakti Kecamatan dengan sistem informasi Kecamatan (Monev) yang terdapat di Kecamatan (Monev) melakukan kunjungan Kecamatan (Monev) dan akan lebih cukup (Monev) yang mampu meningkatkan pelayanan publik (Monev)	Jumlah dokumen hasil Kunjungan dan Kunjungan Pengamatan terhadap Pelayanan Bakti Kecamatan dengan sistem informasi Kecamatan (Monev) yang terdapat di Kecamatan (Monev) melakukan kunjungan Kecamatan (Monev) dan akan lebih cukup (Monev) yang mampu meningkatkan pelayanan publik (Monev)	2.31.02.2018 Kecamatan dan Kecamatan Pengamatan terhadap Pelayanan Bakti Kecamatan (Monev) yang terdapat di Kecamatan (Monev) melakukan kunjungan Kecamatan (Monev)	

NOPE DUE SASARAN RPJMD YANG BERKAITAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROSEDUR / KELOMPOK / WAKTU/LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pendukung Koperasi yang berkembang	Jumlah Pokoknya yang Mengikuti Pelatihan Koperasi dan Mengikuti Tahap pendampingan sebagai pendamping Berencana dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Masyarakat)	2.1.7.06.2.01 - Pendampingan dan Pengembangan Koperasi yang Mengembangkan dalam Daerah Kabupaten Kota	
					Jumlah Pokoknya yang Mengikuti Pelatihan Koperasi	2.1.7.06.2.01 - Pendampingan dan Pengembangan Koperasi yang Mengembangkan dalam Daerah Kabupaten Kota	
					Jumlah Pokoknya yang Mengikuti Pelatihan Koperasi	2.1.7.06.2.01 - Pendampingan dan Pengembangan Koperasi yang Mengembangkan dalam Daerah Kabupaten Kota	
					Jumlah Pokoknya yang Mengikuti Pelatihan Koperasi	2.1.7.06.2.01 - Pendampingan dan Pengembangan Koperasi yang Mengembangkan dalam Daerah Kabupaten Kota	
					Jumlah UHT Laiter yang Produksi, Berada di Atas 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 16000, 17000, 18000, 19000, 20000, 21000, 22000, 23000, 24000, 25000, 26000, 27000, 28000, 29000, 30000, 31000, 32000, 33000, 34000, 35000, 36000, 37000, 38000, 39000, 40000, 41000, 42000, 43000, 44000, 45000, 46000, 47000, 48000, 49000, 50000, 51000, 52000, 53000, 54000, 55000, 56000, 57000, 58000, 59000, 60000, 61000, 62000, 63000, 64000, 65000, 66000, 67000, 68000, 69000, 70000, 71000, 72000, 73000, 74000, 75000, 76000, 77000, 78000, 79000, 80000, 81000, 82000, 83000, 84000, 85000, 86000, 87000, 88000, 89000, 90000, 91000, 92000, 93000, 94000, 95000, 96000, 97000, 98000, 99000, 100000	2.1.7.06.2.01 - Pendampingan dan Pengembangan Koperasi yang Mengembangkan dalam Daerah Kabupaten Kota	
					Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Koperasi	2.1.7.06.2.01 - Pendampingan dan Pengembangan Koperasi yang Mengembangkan dalam Daerah Kabupaten Kota	
					Pendampingan Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Koperasi	2.1.7.06.2.01 - Pendampingan dan Pengembangan Koperasi yang Mengembangkan dalam Daerah Kabupaten Kota	
					Jumlah Pokoknya yang Mengikuti Pelatihan Koperasi	2.1.7.06.2.01.002 - Pendampingan dan Pengembangan Koperasi yang Mengembangkan dalam Daerah Kabupaten Kota	
					Pendampingan Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Koperasi	2.1.7.06.2.01.002 - Pendampingan dan Pengembangan Koperasi yang Mengembangkan dalam Daerah Kabupaten Kota	
					Jumlah Pokoknya yang Mengikuti Pelatihan Koperasi	2.1.7.06.2.01.004 - Pendampingan dan Pengembangan Koperasi yang Mengembangkan dalam Daerah Kabupaten Kota	

4.3 Uraian Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan

Uraian Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan dapat di ilustrasikan di Tabel 4.3 (lampiran 1) dan (lampiran 2)

4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas

Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas dapat di ilustrasikan di Tabel 4.4

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
III	000	000	000	000
2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
1.	2.17.03 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	2.17.03.2.01 - Penetapan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.03.2.01.0001 - Penetapan Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kcs Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2.	2.17.03 - PROGRAM PENJAWAHAN DAN PENERUKAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			2.17.03.2.01.0003 - Pengujian Tata Kelola Kalsmbagaan Koperasi	
			2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemenuhan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
3.	2.17.04 - PROGRAM PENJAWAH KESEHATAN KOPERASI KOPERASI	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	2.17.04.2.01 - Pemetaan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Pemetaan Kesehatan KOP/USP Koperasi Kecamatan Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(PA)	(PB)	(PC)	(PD)	(PE)
4.	2.17.05 – PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Merangkainya kualitas SDM perkoperasi	2.17.05.2.01 – Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.05.2.01.0001 – Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian pada Koperasi dan Kompleksi SDM Koperasi	
5.	2.17.06 – PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERKEMBANGAN KOPERASI	Merangkainya produktivitas koperasi	2.17.06.2.01 – Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.06.2.01.0005 – Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambahan, Akses Pasar, Akses Pendanaan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
			2.17.06.2.01.0006 – Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.06.2.01.0008 – Pemulihan Kelembagaan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.06.2.01.0009 – Pembastayaan Koperasi dalam Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
6.	2.17.07 – PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Merangkainya kapasitas UMKM yang unggul dan mandiri	2.17.07.2.01 – Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pihak Pemangku Kepemerintahan	
			2.17.07.2.01.0002 – Pembudayaan Mental Kemauan Usaha Mikro	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2.17.07.2.01.0010 - Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0015 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0016 - Pemutihan Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
			2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Penguasaan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM (UMKM dan Kewirausahaan) melalui Pendidikan dan Pelatihan	
7.	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Merangsang daya saing UMKM	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
			2.17.08.2.01.0003 - Pemantauan dan Pengembangan Keswastaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
			2.17.06.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
1	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	3.30.02.2.06 - Pengerahan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengelolaan Distribusi, Pengemasan dan Penjualan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Penjualan Bahan Berbahaya Terhadap Ronggong Akhir Bahan Berbahaya (PA-AB) maupun Produk (P-AB)	
1	3.30.03 - PROGRAM PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang aman, murah dan terjangkau	3.30.03.2.01 - Peningkatan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerja	
			3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
iii	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAH POKOK DAN BARANG POKOK	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			3.30.04.2.01.0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
			3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
			3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
11	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya tertib nega dan mutu produk	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	
			3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
			3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	
12	3.30.07 - PROGRAM PENGUJIAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya pengujian dan pemasaran produk dalam negeri	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Pendaftaran Pengujian Produk Dalam Negeri	
			3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Pengujian Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
13	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwujudan Industri	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(2)	(10)	(20)	(30)	(10)
			3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Petani Serta Masyarakat	
			3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
14	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Memangkatnya pemanfaatan informasi industri	3.31.04.2.01 - Pengedaran Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk R.R, R/UT, R/RI dan RPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.31.04.2.01.0001 - Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lainnya Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINIS)	

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran resntra tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran resntra tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja utama (IKU) dapat di ilustrasikan di Tabel 4.5

TABEL 4.5 RENCANA KINERJA UTAMA
FINAL RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BARTO SELATAN

No	KINERJA UTAMA	SASARAN	Tahun 2025	Tahun 2026						Catatan
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	Indikator Kinerja Utama (IKU)									
2	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
3	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
4	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
5	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
6	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
8	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
9	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
10	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
11	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
12	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
13	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
14	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
15	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
16	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
17	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
18	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
19	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
20	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
21	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
22	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
23	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
24	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
25	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
26	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
27	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
28	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
29	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	
30	Indikator Kinerja Utama (IKU)		10	10	10	10	10	10	10	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK) dapat di ilustrasikan di Tabel 4.6

**TABEL 4.0 INDIKATOR KINERJA KUNCI
FINAL RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

[illegible]

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku usaha di Kabupaten Barito Selatan dengan meningkatnya pendapatan dan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan.

Buntok,

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BARITO SELATAN



HARMITO, S.Pd., MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700201 199303 1 019

LAMPIRAN 1

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				7.769.749.813,00		7.769.749.813,00		23.786.765.331,00		24.424.343.333,00		32.000.658.459,00		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.375.377.690,00		6.375.377.690,00		9.934.714.471,00		8.457.201.880,00		11.760.024.055,00		
Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	75	85	6.375.377.690,00	85	6.375.377.690,00	85	9.934.714.471,00	85	8.457.201.880,00	85	11.760.024.055,00	2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN	
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.781.548.710,00		4.781.548.710,00		8.340.885.491,00		6.863.372.900,00		10.166.195.075,00		
Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35	60	4.781.548.710,00	60	4.781.548.710,00	60	8.340.885.491,00	60	6.863.372.900,00	60	10.166.195.075,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	128.200. 000	100		100		100		100		100			
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.653.348.710,00		4.653.348.710,00		8.212.685.491,00		6.735.172.900,00		10.037.995.075,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35	60	4.653.348.710,00	60	4.653.348.710,00	60	8.212.685.491,00	60	6.735.172.900,00	60	10.037.995.075,00		
2.17.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				128.200.000,00		128.200.000,00		128.200.000,00		128.200.000,00		128.200.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	128.200. 000	100	128.200.000,00	100	128.200.000,00	100	128.200.000,00	100	128.200.000,00	100	128.200.000,00		
2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		

LAMPIRAN 2

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	5	65.000.000,00	5	65.000.000,00	5	65.000.000,00	5	65.000.000,00	5	65.000.000,00		
	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)													
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)													
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)													
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)													
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	45	60		60		60		60		60			
	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)													
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)													
2.17.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	45	60	30.000.000,00	60	30.000.000,00	60	30.000.000,00	60	30.000.000,00	60	30.000.000,00		
2.17.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)													
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)													
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				0		0		0		0		0		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi			0		0		0		0		0		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)													
2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				155.830.000,00		155.830.000,00		155.830.000,00		155.830.000,00		155.830.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	155.830.000,00	5	155.830.000,00	5	155.830.000,00	5	155.830.000,00	5	155.830.000,00		
2.17.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		0		0		0		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				101.999.160,00		101.999.160,00		101.999.160,00		101.999.160,00		101.999.160,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	101.999.160,00	1	101.999.160,00	1	101.999.160,00	1	101.999.160,00	1	101.999.160,00		
2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				0		0		0		0		0		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				57.192.000,00		57.192.000,00		57.192.000,00		57.192.000,00		57.192.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	10	10	57.192.000,00	10	57.192.000,00	10	57.192.000,00	10	57.192.000,00	10	57.192.000,00		
2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				464.846.000,00		464.846.000,00		464.846.000,00		464.846.000,00		464.846.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	25	25	464.846.000,00	25	464.846.000,00	25	464.846.000,00	25	464.846.000,00	25	464.846.000,00		
2.17.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				201.074.000,00		201.074.000,00		201.074.000,00		201.074.000,00		201.074.000,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			201.074.000,00		201.074.000,00		201.074.000,00		201.074.000,00		201.074.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)													
2.17.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				201.074.000,00		201.074.000,00		201.074.000,00		201.074.000,00		201.074.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	201.074.000,00	1	201.074.000,00	1	201.074.000,00	1	201.074.000,00	1	201.074.000,00		
2.17.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				0		0		0		0		0		
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0		0		0		0		0		
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		0		0		0		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		0		0		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				385.437.500,00		385.437.500,00		385.437.500,00		385.437.500,00		385.437.500,00		
Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	5	385.437.500,00	5	385.437.500,00	5	385.437.500,00	5	385.437.500,00	5	385.437.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	10	10		10		10		10					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)													
2.17.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	10	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00		
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				96.837.500,00		96.837.500,00		96.837.500,00		96.837.500,00		96.837.500,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	5	96.837.500,00	5	96.837.500,00	5	96.837.500,00	5	96.837.500,00	5	96.837.500,00		
2.17.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		0		0		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				273.600.000,00		273.600.000,00		273.600.000,00		273.600.000,00		273.600.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	273.600.000,00	12	273.600.000,00	12	273.600.000,00	12	273.600.000,00	12	273.600.000,00		
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				122.450.320,00		122.450.320,00		122.450.320,00		122.450.320,00		122.450.320,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			122.450.320,00		122.450.320,00		122.450.320,00		122.450.320,00		122.450.320,00		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	10		10		10		10		10				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)														
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)														
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)														
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)														
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)														
	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)														
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)														
	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)														
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5		5		5		5		5				
2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				92.450.000,00		92.450.000,00		92.450.000,00		92.450.000,00		92.450.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	10	92.450.000,00	10	92.450.000,00	10	92.450.000,00	10	92.450.000,00	10	92.450.000,00		
2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				0		0		0		0		0		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0		0		0		0		0		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.320,00		30.000.320,00		30.000.320,00		30.000.320,00		30.000.320,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	30.000.320,00	5	30.000.320,00	5	30.000.320,00	5	30.000.320,00	5	30.000.320,00		
2.17.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				0		0		0		0		0		
2.17.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				0		0		0		0		0		
2.17.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				0		0		0		0		0		
2.17.01.2.13 - Penataan Organisasi				0		0		0		0		0		
2.17.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				0		0		0		0		0		
2.17.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				0		0		0		0		0		
2.17.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				25.000.000,00		25.000.000,00		1.804.668.391,00		2.106.824.190,00		2.717.323.183,00		
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	100	15	25.000.000,00	30	25.000.000,00	25	1.804.668.391,00	20	2.106.824.190,00	20	2.717.323.183,00	2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN	
2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		1.804.668.391,00		2.106.824.190,00		2.717.323.183,00		
Tersedianya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	1.804.668.391,00	1	2.106.824.190,00	1	2.717.323.183,00		
2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		1.804.668.391,00		2.106.824.190,00		2.717.323.183,00		
Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	1.804.668.391,00	1	2.106.824.190,00	1	2.717.323.183,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.02.2.02 - Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.17.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				37.978.200,00		37.978.200,00		1.817.646.591,00		2.119.802.390,00		2.730.301.383,00		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	100	25	37.978.200,00	25	37.978.200,00	20	1.817.646.591,00	20	2.119.802.390,00	10	2.730.301.383,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				37.978.200,00		37.978.200,00		1.817.646.591,00		2.119.802.390,00		2.730.301.383,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	5	5	37.978.200,00	5	37.978.200,00	5	1.817.646.591,00	5	2.119.802.390,00	5	2.730.301.383,00		
	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	5	5		5		5		5		5			
2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				27.278.200,00		27.278.200,00		1.806.946.591,00		2.109.102.390,00		2.719.601.383,00		
Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	5	5	27.278.200,00	5	27.278.200,00	5	1.806.946.591,00	5	2.109.102.390,00	5	2.719.601.383,00		
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				10.700.000,00		10.700.000,00		10.700.000,00		10.700.000,00		10.700.000,00		
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	5	5	10.700.000,00	5	10.700.000,00	5	10.700.000,00	5	10.700.000,00	5	10.700.000,00		
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				68.016.800,00		68.016.800,00		1.847.685.191,00		2.149.840.990,00		2.760.339.983,00		
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi aktif (%) (%)	26	20	68.016.800,00	20	68.016.800,00	20	1.847.685.191,00	20	2.149.840.990,00	20	2.760.339.983,00	2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN	
2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi/ Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				68.016.800,00		68.016.800,00		1.847.685.191,00		2.149.840.990,00		2.760.339.983,00		
Tersedianya Koperasi yang berkualitas	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	93	93	68.016.800,00	93	68.016.800,00	93	1.847.685.191,00	93	2.149.840.990,00	93	2.760.339.983,00		
	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				68.016.800,00		68.016.800,00		1.847.685.191,00		2.149.840.990,00		2.760.339.983,00		
Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	93	93	68.016.800,00	93	68.016.800,00	93	1.847.685.191,00	93	2.149.840.990,00	93	2.760.339.983,00		
2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)			0		0		0		0		0		
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				31.870.400,00		31.870.400,00		1.811.538.791,00		2.113.694.590,00		2.724.193.583,00		
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%)	43	20	31.870.400,00	20	31.870.400,00	20	1.811.538.791,00	20	2.113.694.590,00	20	2.724.193.583,00	2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN	
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				31.870.400,00		31.870.400,00		1.811.538.791,00		2.113.694.590,00		2.724.193.583,00		
Terciptanya SDM perkoperasian yang berkualitas	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	13	13	31.870.400,00	13	31.870.400,00	13	1.811.538.791,00	13	2.113.694.590,00	13	2.724.193.583,00		
2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				31.870.400,00		31.870.400,00		1.811.538.791,00		2.113.694.590,00		2.724.193.583,00		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	13	13	31.870.400,00	13	31.870.400,00	13	1.811.538.791,00	13	2.113.694.590,00	13	2.724.193.583,00		
2.17.05.2.02 - Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terciptanya SDM yang berkualitas				0		0		0		0		0		
2.17.05.2.03 - Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Terciptanya SDM yang berkualitas				0		0		0		0		0		
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				498.866.263,00		498.866.263,00		2.278.534.654,00		2.580.690.453,00		3.191.189.446,00		
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	27	20	498.866.263,00	20	498.866.263,00	20	2.278.534.654,00	20	2.580.690.453,00	20	3.191.189.446,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				498.866.263,00		498.866.263,00		2.278.534.654,00		2.580.690.453,00		3.191.189.446,00		
Terciptanya Koperasi yang berkualitas	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	86	86	498.866.263,00	86	498.866.263,00	86	2.278.534.654,00	86	2.580.690.453,00	86	3.191.189.446,00		
	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	93	93		93		93		93		93			
	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya (Unit Usaha)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	3	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	93	93		93		93		93		93			
	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	5	5		5		5		5		5			
2.17.06.2.01.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	5	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00		
2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	5	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00		
2.17.06.2.01.0004 - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	3	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				110.694.868,00		110.694.868,00		110.694.868,00		110.694.868,00		110.694.868,00		
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	93	93	110.694.868,00	93	110.694.868,00	93	110.694.868,00	93	110.694.868,00	93	110.694.868,00		
2.17.06.2.01.0006 - Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya (Unit Usaha)	12	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
2.17.06.2.01.0008 - Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	86	86	10.000.000,00	86	10.000.000,00	86	10.000.000,00	86	10.000.000,00	86	10.000.000,00		
2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				278.171.395,00		278.171.395,00		2.057.839.786,00		2.359.995.585,00		2.970.494.578,00		
Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	93	93	278.171.395,00	93	278.171.395,00	93	2.057.839.786,00	93	2.359.995.585,00	93	2.970.494.578,00		
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				563.205.860,00		563.205.860,00		2.342.874.251,00		2.645.030.050,00		3.255.529.043,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	100	30,92	563.205.860,00	17,27	563.205.860,00	17,27	2.342.874.251,00	17,27	2.645.030.050,00	17,27	3.255.529.043,00	2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN	
	Pertumbuhan Wirausaha (%)	100	15		20		25		20		20			
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				563.205.860,00		563.205.860,00		2.342.874.251,00		2.645.030.050,00		3.255.529.043,00		
Terciptanya UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	4	4	563.205.860,00	4	563.205.860,00	4	2.342.874.251,00	4	2.645.030.050,00	4	3.255.529.043,00		
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)													
	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	3.545	3.545				3.545				3.545			
	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)													
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)													
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	11.464	11.464				11.464				11.464			
	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	1.720	1.720		1.720		1.720		1.720		1.720			
2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro				137.293.000,00		137.293.000,00		137.293.000,00		137.293.000,00		137.293.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	4	4	137.293.000,00	4	137.293.000,00	4	137.293.000,00	4	137.293.000,00	4	137.293.000,00		
2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				11.590.000,00		11.590.000,00		11.590.000,00		11.590.000,00		11.590.000,00		
Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	3.545	3.545	11.590.000,00	3.545	11.590.000,00	3.545	11.590.000,00	3.545	11.590.000,00	3.545	11.590.000,00		
2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)			0		0		0		0		0		
2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				12.499.660,00		12.499.660,00		12.499.660,00		12.499.660,00		12.499.660,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	1.720	1.720	12.499.660,00	1.720	12.499.660,00	1.720	12.499.660,00	1.720	12.499.660,00	1.720	12.499.660,00		
2.17.07.2.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.17.07.2.01.0008 - Pemulihan Usaha Mikro				92.134.000,00		92.134.000,00		1.871.802.391,00		2.173.958.190,00		2.784.457.183,00		
Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	3.545	3.545	92.134.000,00	3.545	92.134.000,00	3.545	1.871.802.391,00	3.545	2.173.958.190,00	3.545	2.784.457.183,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.07.2.01.0009 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)			0		0		0		0		0		
2.17.07.2.01.0010 - Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)			0		0		0		0		0		
2.17.07.2.01.0011 - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)			0		0		0		0		0		
2.17.07.2.01.0012 - Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)			0		0		0		0		0		
2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik				242.878.000,00		242.878.000,00		242.878.000,00		242.878.000,00		242.878.000,00		
Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	11.464	11.464	242.878.000,00	11.464	242.878.000,00	11.464	242.878.000,00	11.464	242.878.000,00	11.464	242.878.000,00		
2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				29.891.000,00		29.891.000,00		29.891.000,00		29.891.000,00		29.891.000,00		
Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	11.464	11.464	29.891.000,00	11.464	29.891.000,00	11.464	29.891.000,00	11.464	29.891.000,00	11.464	29.891.000,00		
2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan				36.920.200,00		36.920.200,00		36.920.200,00		36.920.200,00		36.920.200,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	25	25	36.920.200,00	25	36.920.200,00	25	36.920.200,00	25	36.920.200,00	25	36.920.200,00		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				169.434.600,00		169.434.600,00		1.949.102.991,00		2.251.258.790,00		2.861.757.783,00		
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	4	20	169.434.600,00	20	169.434.600,00	20	1.949.102.991,00	20	2.251.258.790,00	20	2.861.757.783,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				169.434.600,00		169.434.600,00		1.949.102.991,00		2.251.258.790,00		2.861.757.783,00		
Terciptanya Jumlah UKM yang Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	4	4	169.434.600,00	4	169.434.600,00	4	1.949.102.991,00	4	2.251.258.790,00	4	2.861.757.783,00		
	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)													
	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	1.720	1.720				1.720				1.720			
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)													
2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)				0		0		0		0		0	
2.17.08.2.01.0003 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	1.720	1.720	10.000.000,00	1.720	10.000.000,00	1.720	10.000.000,00	1.720	10.000.000,00	1.720	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.08.2.01.0004 - Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)			0		0		0		0		0		
2.17.08.2.01.0005 - Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)			0		0		0		0		0		
2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				159.434.600,00		159.434.600,00		1.939.102.991,00		2.241.258.790,00		2.851.757.783,00		
Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	4	4	159.434.600,00	4	159.434.600,00	4	1.939.102.991,00	4	2.241.258.790,00	4	2.851.757.783,00		
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.733.594.954,00		1.733.594.954,00		10.631.936.909,00		12.142.715.904,00		15.195.210.869,00		
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				32.996.100,00		32.996.100,00		1.812.664.491,00		2.114.820.290,00		2.725.319.283,00		
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	100	100	32.996.100,00	100	32.996.100,00	100	1.812.664.491,00	100	2.114.820.290,00	100	2.725.319.283,00	2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN	
3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				0		0		0		0		0		
3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang				0		0		0		0		0		
3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.02.2.04 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri				0		0		0		0		0		
3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat				0		0		0		0		0		
3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				32.996.100,00		32.996.100,00		1.812.664.491,00		2.114.820.290,00		2.725.319.283,00		
Terciptanya Data dan Dokumen terkait Surat Izin Usaha Perdagangan yang di fasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	5	5	32.996.100,00	5	32.996.100,00	5	1.812.664.491,00	5	2.114.820.290,00	5	2.725.319.283,00		
3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				32.996.100,00		32.996.100,00		1.812.664.491,00		2.114.820.290,00		2.725.319.283,00		
Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	5	5	32.996.100,00	5	32.996.100,00	5	1.812.664.491,00	5	2.114.820.290,00	5	2.725.319.283,00		
3.30.02.2.07 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				498.941.778,00		498.941.778,00		2.278.610.169,00		2.580.765.968,00		3.191.264.961,00		
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	100	79,4	498.941.778,00	96,8	498.941.778,00	96,8	2.278.610.169,00	100	2.580.765.968,00	100	3.191.264.961,00	2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN	
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				457.570.180,00		457.570.180,00		2.237.238.571,00		2.539.394.370,00		3.149.893.363,00		
Terciptanya Kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan)	0	0	457.570.180,00	0	457.570.180,00	0	2.237.238.571,00	0	2.539.394.370,00	0	3.149.893.363,00		
	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (laporan)													
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				457.570.180,00		457.570.180,00		2.237.238.571,00		2.539.394.370,00		3.149.893.363,00		
Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1	1	457.570.180,00	1	457.570.180,00	1	2.237.238.571,00	1	2.539.394.370,00	1	3.149.893.363,00		
3.30.03.2.01.0003 - Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terselenggarannya kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.30.03.2.01.0004 - Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota				0		0		0		0		0		
Tersedianya informasi terkait lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (laporan)			0		0		0		0		0		
3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				41.371.598,00		41.371.598,00		41.371.598,00		41.371.598,00		41.371.598,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terciptanya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)			41.371.598,00		41.371.598,00		41.371.598,00		41.371.598,00		41.371.598,00		
3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				41.371.598,00		41.371.598,00		41.371.598,00		41.371.598,00		41.371.598,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	25	25	41.371.598,00	25	41.371.598,00	25	41.371.598,00	25	41.371.598,00	25	41.371.598,00		
3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)			0		0		0		0		0		
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				586.894.876,00		586.894.876,00		2.366.563.267,00		2.668.719.066,00		3.279.218.059,00		
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	100	19,79	586.894.876,00	19,79	586.894.876,00	19,79	2.366.563.267,00	19,79	2.668.719.066,00	20,83	3.279.218.059,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				487.204.200,00		487.204.200,00		2.266.872.591,00		2.569.028.390,00		3.179.527.383,00		
Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	7	7	487.204.200,00	7	487.204.200,00	7	2.266.872.591,00	7	2.569.028.390,00	7	3.179.527.383,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)													
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)													
3.30.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				0		0		0		0		0		
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)			0		0		0		0		0		
3.30.04.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				0		0		0		0		0		
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)			0		0		0		0		0		
3.30.04.2.01.0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				487.204.200,00		487.204.200,00		2.266.872.591,00		2.569.028.390,00		3.179.527.383,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	7	7	487.204.200,00	7	487.204.200,00	7	2.266.872.591,00	7	2.569.028.390,00	7	3.179.527.383,00		
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				99.690.676,00		99.690.676,00		99.690.676,00		99.690.676,00		99.690.676,00		
Terkendalnya Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	6	6	99.690.676,00	6	99.690.676,00	6	99.690.676,00	6	99.690.676,00	6	99.690.676,00		
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)													
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				67.716.700,00		67.716.700,00		67.716.700,00		67.716.700,00		67.716.700,00		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	6	6	67.716.700,00	6	67.716.700,00	6	67.716.700,00	6	67.716.700,00	6	67.716.700,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)			0		0		0		0		0		
3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				31.973.976,00		31.973.976,00		31.973.976,00		31.973.976,00		31.973.976,00		
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	6	6	31.973.976,00	6	31.973.976,00	6	31.973.976,00	6	31.973.976,00	6	31.973.976,00		
3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				0		0		0		0		0		
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN	
3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terciptanya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)			0		0		0		0		0		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)													
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)													
3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)			0		0		0		0		0		
3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)			0		0		0		0		0		
3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor				0		0		0		0		0		
Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)			0		0		0		0		0		
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				208.668.200,00		208.668.200,00		1.988.336.591,00		2.290.492.390,00		2.900.991.383,00		
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	100	100	208.668.200,00	100	208.668.200,00	100	1.988.336.591,00	100	2.290.492.390,00	100	2.900.991.383,00	2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN	
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				208.668.200,00		208.668.200,00		1.988.336.591,00		2.290.492.390,00		2.900.991.383,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaku usaha yang mendapat pengawasan (pelaku Usaha)	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	1.306	1.306	208.668.200,00	1.306	208.668.200,00	1.306	1.988.336.591,00	1.306	2.290.492.390,00	1.306	2.900.991.383,00		
	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	1.306	1.306		1.306		1.306		1.306		1.306			
3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				172.165.400,00		172.165.400,00		1.951.833.791,00		2.253.989.590,00		2.864.488.583,00		
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	1.306	1.306	172.165.400,00	1.306	172.165.400,00	1.306	1.951.833.791,00	1.306	2.253.989.590,00	1.306	2.864.488.583,00		
3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				36.502.800,00		36.502.800,00		36.502.800,00		36.502.800,00		36.502.800,00		
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	1.306	1.306	36.502.800,00	1.306	36.502.800,00	1.306	36.502.800,00	1.306	36.502.800,00	1.306	36.502.800,00		
3.30.07 - PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				406.094.000,00		406.094.000,00		2.185.762.391,00		2.487.918.190,00		3.098.417.183,00		
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	100	20	406.094.000,00	20	406.094.000,00	20	2.185.762.391,00	20	2.487.918.190,00	20	3.098.417.183,00	2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN	
3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				406.094.000,00		406.094.000,00		2.185.762.391,00		2.487.918.190,00		3.098.417.183,00		
Terciptanya Pelaku Usaha yang mendapatkan promosi produk unggulan Kalteng	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	10	10	406.094.000,00	10	406.094.000,00	10	2.185.762.391,00	10	2.487.918.190,00	10	3.098.417.183,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Orang)													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Orang)			0		0		0		0		0		
3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				406.094.000,00		406.094.000,00		2.185.762.391,00		2.487.918.190,00		3.098.417.183,00		
Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	10	10	406.094.000,00	10	406.094.000,00	10	2.185.762.391,00	10	2.487.918.190,00	10	3.098.417.183,00		
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				946.954.410,00		946.954.410,00		4.506.291.192,00		5.110.602.785,00		6.331.600.776,00		
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				84.664.800,00		84.664.800,00		1.864.333.191,00		2.166.488.990,00		2.776.987.983,00		
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	100	17,95	84.664.800,00	20,51	84.664.800,00	20,51	1.864.333.191,00	20,51	2.166.488.990,00	20,51	2.776.987.983,00	2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN	
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				84.664.800,00		84.664.800,00		1.864.333.191,00		2.166.488.990,00		2.776.987.983,00		
Tersedianya Data dan Dokumen terkait Pertambahan Jumlah Investasi Sektor Industri dan kawasan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3	3	84.664.800,00	3	84.664.800,00	3	1.864.333.191,00	3	2.166.488.990,00	3	2.776.987.983,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Laporan)													
	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi)													
	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi)													
	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)													
3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)			0		0		0		0		0		
3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				13.824.800,00		13.824.800,00		13.824.800,00		13.824.800,00		13.824.800,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3	3	13.824.800,00	3	13.824.800,00	3	13.824.800,00	3	13.824.800,00	3	13.824.800,00		
3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				0		0		0		0		0		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)			0		0		0		0		0		
3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				0		0		0		0		0		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)			0		0		0		0		0		
3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				21.617.800,00		21.617.800,00		21.617.800,00		21.617.800,00		21.617.800,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3	3	21.617.800,00	3	21.617.800,00	3	21.617.800,00	3	21.617.800,00	3	21.617.800,00		
3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				49.222.200,00		49.222.200,00		1.828.890.591,00		2.131.046.390,00		2.741.545.383,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3	3	49.222.200,00	3	49.222.200,00	3	1.828.890.591,00	3	2.131.046.390,00	3	2.741.545.383,00		
3.31.02.2.01.0007 - Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri				0		0		0		0		0		
Tersusunnya rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi)			0		0		0		0		0		
3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)			0		0		0		0		0		
3.31.02.2.01.0009 - Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri				0		0		0		0		0		
Tersedianya data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Laporan)			0		0		0		0		0		
3.31.02.2.01.0010 - Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri				0		0		0		0		0		
Tersusunnya rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi)			0		0		0		0		0		
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	100	9,09	0	22,73	0	22,73	0	22,73	0	22,73	0	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Tersedianya Data dan Dokumen Izin Usaha Industri yang diterbitkan	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)													
3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)			0		0		0		0		0		
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				862.289.610,00		862.289.610,00		2.641.958.001,00		2.944.113.795,00		3.554.612.793,00		
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (%)	100	9,09	862.289.610,00	22,73	862.289.610,00	22,73	2.641.958.001,00	22,73	2.944.113.795,00	22,73	3.554.612.793,00	2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN	
3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				862.289.610,00		862.289.610,00		2.641.958.001,00		2.944.113.795,00		3.554.612.793,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Data dan Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)			862.289.610,00		862.289.610,00		2.641.958.001,00		2.944.113.795,00		3.554.612.793,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)													
3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				862.289.610,00		862.289.610,00		2.641.958.001,00		2.944.113.795,00		3.554.612.793,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	10	10	862.289.610,00	10	862.289.610,00	10	2.641.958.001,00	10	2.944.113.795,00	10	3.554.612.793,00		
3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				0		0		0		0		0		
Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)			0		0		0		0		0		
3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				0		0		0		0		0		
Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)			0		0		0		0		0		